



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMINTAAN BANTUAN KEMANUSIAAN DAN DUKUNGAN POLITIK INDONESIA TERHADAP UKRAINA

Lisbet

Peneliti Muda

lisbet.sihombing@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri pada 6 April 2022, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan laporan terkait sulit dan rumitnya proses evakuasi WNI dari wilayah konflik di Ukraina. Adapun jumlah total WNI yang tinggal di Ukraina sebanyak 165 orang dan yang telah keluar sebanyak 133 orang. Sementara 32 WNI yang masih tinggal di Ukraina, 23 orang memilih tetap tinggal dengan berbagai alasan pribadi dan sisanya adalah staf KBRI. Pada Rapat Kerja tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan permintaan Wakil Menlu Ukraina Emine Dzhaparova kepada semua negara, termasuk Indonesia, yaitu permintaan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bahan pangan mengingat stoknya saat ini sudah menipis.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan situasi terbaru di Ukraina, pada 11 April 2022, Komisi I DPR RI telah melakukan *Courtesy Call* dengan Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia Vasyl Hamianin. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Ukraina meminta dukungan Komisi I DPR RI terkait dukungan politik maupun bantuan kemanusiaan. Dubes juga meminta dukungan terkait dengan persoalan *finance* karena beberapa bank di Indonesia tidak dapat memfasilitasi pengiriman transfer uang dari Indonesia ke Ukraina.

Selain itu, Dubes Ukraina juga meminta dukungan terhadap *Independent International Commission of Inquiry* yang telah dibentuk Dewan HAM PBB di Jenewa pada 4 Maret 2022. Dukungan terhadap *Independent International Commission of Inquiry* ini penting artinya bagi Ukraina apalagi setelah dilaksanakannya Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB pada 7 April 2022. Sidang ini telah mengadopsi resolusi "*Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council*" atau mengenai penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB. Resolusi ini diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan dari 93 negara, 24 negara menolak, dan 58 negara abstain, termasuk Indonesia. Dalam *explanation of vote*, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir, menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus bertanggung jawab dan dibawa ke pengadilan. *Independent International Commission of Inquiry* ini perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara objektif dan transparan serta melaporkan hasil temuannya. Majelis Umum PBB harus bersikap hati-hati agar tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada. Selain itu, Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat.

Pada kesempatan tersebut, Komisi I juga menyampaikan kepada Dubes Ukraina perihal rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengundang Pemimpin Rusia dan Ukraina pada saat KTT G20 di Bali, November 2022. Meskipun Dubes Ukraina menyampaikan bahwa G20 merupakan momen yang sangat luar biasa, namun prioritas utama bagi Ukraina saat ini adalah bertahan hidup dari situasi perang.

Atensi DPR

Komisi I melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kemlu untuk menyampaikan simpati dan menghimbau agar semua pihak mau menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Ukraina. Selain itu, Komisi I perlu mendorong Kemlu untuk memberikan dukungan terhadap *Independent International Commission of Inquiry* yang telah dibentuk pada 4 Maret 2022.

Terkait rencana Pemerintah untuk mengundang Pemimpin Rusia dan Ukraina pada saat penyelenggaraan KTT G20 November 2022 di Bali, Komisi I berharap agar Kemlu dapat menjalankan diplomasi bergerilya. Diplomasi bergerilya ini perlu dilakukan karena sejumlah negara telah memastikan tidak akan hadir pada saat KTT G20 apabila Rusia hadir. Hal tersebut tentu sangat disayangkan. Kesuksesan pelaksanaan KTT G20 baik secara substansi maupun penyelenggaraan sangat penting bagi Indonesia karena KTT G20 merupakan salah satu forum penting dalam skala internasional.

Sumber

<https://kemlu.go.id>, 8 April 2022
<https://politik.rmol.id>, 6 April 2022
<https://www.dpr.go.id>, 6 April 2022
<https://www.dpr.go.id>, 11 April 2022
Media Indonesia, 7 April 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Juli Panlima S
 Sri Nurhayati Q
 Rasbin
 Venty Eka Satya
 Rafika Sari

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.